

ABSTRAK

Penelitian pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana melalui perencanaan tata guna tanah di Kecamatan Cangringan berperan penting bagi kelangsungan hidup manusia dan kelestarian alam. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan: 1) bagaimana implementasi kebijakan pengurangan resiko bencana melalui kebijakan pertanahan di daerah bencana di Kabupaten Sleman; 2) mengidentifikasi alasan strategi pemerintah dalam pengurangan bencana melalui suatu kebijakan pemerintah. Data dan Informasi dihimpun dari beberapa sumber dengan teknik; a) Studi dokumen; b) wawancara; c) penyebaran questioner. melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang dihasilkan dari keterangan narasumber dan responden. Pemerintah dan masyarakat bekerjasama dalam menciptakan kesadaran penanggulangan bencana dari jangka waktu pra bencana, saat bencana, hingga setelah bencana. Tindakan pertama yang dilakukan oleh pemerintah selama tahap pra-bencana adalah membuat pemetaan tanah dengan bentuk daerah rawan bencana, menciptakan sistem peringatan dini. Pada tahap bencana, BPBD Kabupaten Sleman mengkoordinasikan pembentukan korban bencana melalui jalur evakuasi untuk menyediakan barak evakuasi dan memenuhi kebutuhan primer selama evakuasi. Setelah terjadinya bencana pemerintah mengeluarkan kebijakan relokasi hunian yang semula di kawasan rawan bencana III ke kawasan rawan bencana II, I dengan bentuk Hunian Tetap. Dengan tujuan untuk mewujudkan kawasan yang aman dari bencana BPN dan DISPENTARU Kabupaten Sleman menutup perizinan dan menindak pelanggaran pendirian hunian di kawasan rawan bencana III.

Kata Kunci: *Pengurangan Resiko, Bencana Alam, Tata Guna Tanah*

ABSTRACT

Research on implementation of disaster risk reduction policy through land use planning in Cangringan, Sleman district plays an important role for human survival and nature conservation. This research aims to answer the problems: 1) how the implementation of disaster risk reduction policy through land policy in disaster area in Sleman Regency; 2) identify the reasons for government strategies in disaster reduction through a government policy. Data obtained from several sources by technique; a) Study documents; b) field study. Mixed research method in terms of this used to analys the real object research. Governments and communities work together in creating disaster awareness awareness from pre-disaster time, during disaster, to after disaster. The first action taken by the government during the pre-disaster phase is to make land mapping with the form of disaster prone areas, creating early warning system. At the stage of the disaster, BPBD of Sleman Regency coordinates the formation of disaster victims through the evacuation route to provide evacuation barracks and cover the primary needs during evacuation. After the disaster the government issued a residential relocation policy which was originally in disaster prone area III to disaster prone area II, I with permanent residence design. With the aim to realize the safe area of disaster BPN and DISPENTARU Sleman District closed the permit and crack down on the establishment of residential in disaster prone area III.

Keywords : Risk Reduction, Disaster, land use planning